

*Executive*  
*Seminar Internasional*  
**MORALITAS DALAM PEMBANGUNAN**  
**"KONTRIBUSI ETIKA DALAM PEMBANGUNAN"**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
All rights reserved  
2011

**Penulis:**  
Prof. Ian Falk, Ph.D., dkk

**Editor/Penyunting:**  
Drs. Eko Handoyo, M.Si.  
Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A.  
Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A.

**Desain Cover:**  
Basuki, S.I.Kom.

**Desain Layout/Isi:**  
Meldy Septiawan, S.Pd.

Penerbitan Kerjasama antara:  
1. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang  
2. Penerbit, Widya Karya - Semarang.

Cetakan I, Juli 2011

**Perpustakaan Nasional / Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Moralitas dalam pembangunan, kontribusi etika  
dalam pembangunan / penulis, Ian Falk  
; editor, Eko Handoyo, Moh Solehatul  
Mustofa, Kuncoro Bayu Prasetyo – Cet.1–  
; Semarang : Widya Karya, 2011  
xvii, 316 hlm. ; 29 cm.

ISBN : 978-602-8517-50-8

1. Moralitas Dalam Pembangunan-Etika Dalam Pembangunan  
I. Eko Handoyo I. Moh Solehatul Mustofa III. Kuncoro Bayu P.

Hery Prasetyo, S.Sos, M.Sosio<sup>40</sup>.

### Abstrak

Dengan diadopsinya konsep *Developmentalisme*, tanpa menilik historisitas dan akar epistemologi, membawa konsekuensi pada bagaimana NKRI mempergunakannya secara politis, dimana *Mode of Orality* menjadi ruang diskursus bagi yang politis dan elitis. Pada titik inilah, sebuah praktik etika terjadi dan diterima sekaligus dipertontonkan sebagai kebenaran negara bangsa.

**Keyword:** *Developmentalisme*, Pembangunan, *Mode of Orality*, Praktik Etika.

Pembangunan dan moralitas, dua permasalahan ini seakan berjalan pada tempat yang sama tetapi dalam dimensi yang berbeda. Pembangunan banyak berpusat pada permasalahan yang nyata, fisik, dan materialistis sementara moralitas bergerak pada permasalahan yang bersifat spiritual. Dalam konteks ini, penulis mendiskusikan permasalahan dualitas<sup>41</sup>, pembangunan dan moralitas dengan merujuk pada dimensi sosiologis yang mengitarinya.

### Diskursus Pembangunan NKRI

Pembangunan secara etimologis, khususnya, merujuk pada konsep *development*. Dalam bahasa Indonesia, konsep *development* berubah menjadi pembangunan, dengan kata dasar bangun yang artinya adanya kehendak aktif dalam bangkit, beranjak, keluar dari keadaan tertidur atau dalam pengertian lain menjadi keluar dari keadaan tidak sadar. Dalam penyempadanan konsep pembangunan tersebut terdapat kerancuan esensi yang memperlihatkan adanya permasalahan. Permasalahan yang muncul dari konsep pembangunan dan *development* dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari setting socio-politik di Eropa di mana asal-usul *development* berkaitan dengan pelepasan diri dari dogmatism dan pembentukan struktur masyarakat kapitalisme.

Dalam peletakan diri di luar dogmatism, Kant dengan *What Is Enlightenment*<sup>42</sup> menunjukkan bagaimana manusia berhadapan dengan situasi yang menempatkan dirinya dalam formasi non rasional. Diri manusia berada dalam ruang pengetahuan yang terkategori dalam pembenaran-pembenaran baku. Hanya melalui pembenaran baku inilah, manusia meletakkan dirinya dan dunianya sebagai satu-satunya yang diketahui. Bagi Kant, pembenaran akan aturan kebenaran tanpa adanya ruang bagi rasio untuk

---

<sup>40</sup> Saat ini penulis menjadi staf pengajar Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

<sup>41</sup> Penulis menggunakan dualitas dengan merujuk pada konsepsi Giddens. Bagi Giddens, teoritis sosial, seringkali terjebak pada permasalahan individu dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya dualism didalam melakukan analisis. Dalam mengkritik teori sosial, Giddens mengembangkan konsep dualitas didalam teorinya, dimana dimensi-dimensi yang terbedakan, tidak lagi terwujud sebagai yang terpisah, tetapi sebagai yang yang terbedakan dan tergerak dalam lintas strukurasi. Giddens, A. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. London: Macmilian, 1976.

<sup>42</sup> Kant, Immanuel. *On History*. Indianapolis, New York. The Bobbs-Merril, co inc, 1963.

melakukan kerja penyelidikan kebenaran menempatkan manusia sebagai objek dari dogmatisme itu sendiri.

Pada titik ini, Kant berusaha menempatkan rasionalitas sebagai dasar berpikir, bertindak dan menilai kebenaran. Manusia diarahkan menggunakan rasionya untuk menjadi mawas akan formasi pengetahuan. Rasio lah yang menjadi dasar bagi moral dalam pengertian Kant. Moralitas dan rasio digerakkan dalam bentuk universal dalam masyarakat kosmopolitan dengan berdasar pada humanisme. Melalui humanisme yang tergerak secara apriori sintetik, rasio kemudian diarahkan untuk mencari dasar moralitas.

Tradisi berpikir tentang bagaimana moralitas dibentuk dan diarahkan ini berubah dengan adanya Hegel<sup>43</sup>. Penggunaan rasio yang terbatas oleh nomena Kantian oleh Hegel diubah dengan menempatkan segalanya pada rasio secara total dan absolut. Rasio menjadi satu-satunya dasar dalam menempatkan manusia. Apa yang ada dan diketahui oleh manusialah yang rasional dan apa yang ada di luar rasionalitas tidak lagi diberikan ruang. Rasio Hegel menempatkan kesadaran manusia dalam kerangka rasional yang terakumulasi dalam bentuk negara.

Kemunculan negara yang dibayangkan sebagai wadah seluruh rasionalitas manusia menjadi titik sentral dari bagaimana sebuah negara kemudian menjadi pusat dari manusia –sebagai warga negaranya– diarahkan, dibentuk dan membentuk dunia di luar negara. Negara menjadi isu sentral bagi bagaimana negara-negara Eropa melakukan ekspansi ke dalam wilayah-wilayah di Luar Eropa, termasuk kewilayah nusantara.

Konsep negara dalam pengertian negara eropa tentu tidak dapat dilepaskan dari pergolakan yang terjadi secara ekonomi politik. Dalam pergolakan ini, muncul kelas menengah dengan kesadaran politik, kebangkrutan Estate<sup>44</sup> dalam mempertahankan sistem politiknya, kemunculan dan mulai bangkitnya mode produksi<sup>45</sup>. Munculnya mode produksi dalam pengertian marxian terbentuk dengan adanya kelas menengah atau dalam konteks ini kelas yang berada di luar Estate, yaitu yang memiliki sarana produksi<sup>46</sup>.

Melalui pembentukan ruang publik, borjuasi mampu mengikutsertakan proletar dalam merubah tatanan politik. Perubahan tatanan politik ini berujung pada bagaimana negara berada pada kelas yang menguasainya atau negara borjuasi. Proletar hanya menjadi objek pelengkap bagi negara, objek yang diatur dan didisiplinkan oleh negara.

Melalui perspektif marxian ini permasalahan yang kemudian dimunculkan terletak pada negara boujuasi, yaitu ketika rasionalitas negara dalam pengertian Hegel berubah menjadi rasional dalam sistem politik negara boujuasi<sup>47</sup>. Melalui materialisme, bentuk-produksi yang dibentuk dan diciptakan oleh negara berkaitan dengan pemenuhan Hegelian menjadi terpuruk dengan bentuk negara borjuasi ini.

Negara telah dikuasi oleh borjuasi ketika Eropa melakukan ekspansi dan membentuk wilayah-wilayah kolonial. Mulailah digerakkan sistem ekonomi yang berusaha menempatkan pasar sebagai satu-satunya tempat yang rasional. Dalam hal ini,

<sup>43</sup> Hegel, G, W, L. *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

<sup>44</sup> Estate, merupakan konsepsi yang dirujukan pada tradisi pertengahan di Prancis. Di dalam Estate, terdapat tiga golongan; Gereja, Kerajaan, dan Bangsawan. Estate inilah yang memiliki kekuatan Politik, Sosio-kultural dalam menghadirkan kehidupan bagi rakyatnya.

<sup>45</sup> Spybey, Tony. *Social Change, Development & Dependency*. Cambridge: Polity Press, 1996.

<sup>46</sup> Marx, Karl., Engels, F. *Manifesto of The Communist Party*. Utrecht: Open Source Socialist Publishing, 2008.

<sup>47</sup> Renton, Dave (ed). *Karl Marx: Membongkar Akar Krisis Global*. Yogyakarta: Resist Book, 2009.

setiap manusia dibayangi mampu secara otonom memenuhi dan mendapatkan seluruh kebutuhannya. Negara berusaha ditempatkan pada ruang kekuasaan bagi birokratisasi warga negara tanpa banyak mempengaruhi pasar.

Sistem ekonomi dan politik yang terjadi ini memiliki konsekuensi dalam tatanan rasio dan moralitas. Khususnya ketika dibayangkan ulang bagaimana sebuah *aufklärung* Kantian itu hendak dicapai. Bagaimana kemudian sebuah bentuk rasio yang universal dengan menempatkan humanitas sebagai bentuk capaian, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Rasio berubah menjadi instrumen.

Negara-negara Eropa berusaha menempatkan rasionalitasnya pada pemakmuran borjuasi dengan membentuk wilayah di luar dirinya sebagai wilayah bagi praktik produksi. Sementara wilayah-wilayah kolonial dihadapkan pada instrumentalitas kondisi bagi pencapaian sebuah kemerdekaan. Lalu dimanakah sebuah moralitas yang rasional dan humanistik? Dimanakah manusia yang tidak hanya mengarahkan rasionalitasnya pada kebutuhan-kebutuhan pemenuhan modal? Bagaimanakah rasionalitas melepaskan diri dari logika modal yang mengekang kehidupan? Kemudian bagaimanakah sebuah bentuk moralitas yang terbentuk dari kemerdekaan pada wilayah-wilayah kolonial?

Pasca Perang Dunia II, muncul wilayah-wilayah kolonial yang menyatakan kemerdekaannya termasuk wilayah Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya dengan berbentuk *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*<sup>48</sup>. Untuk membicarakan NKRI selidaknya terdapat tiga periode dalam memetakan kondisi sosial dan politiknya. Periode pertama disebut sebagai Orde Lama, dimana negara diarahkan untuk membentuk identitas dengan menghadapkan diri pada permasalahan nasionalitas. Nasionalitas yang dibentuk dihadapan dengan era perang dingin atau melalui identitas negara non-blok.

NKRI berusaha membangun identitas kesatuan wilayahnya sebagai sebuah negara baru tanpa berkehendak untuk terjebak pada permasalahan ekonomi-politik global. Permasalahan yang kemudian muncul ketika pembentukan identitas yang nasionalistik ini terselesaikan, Orde Lama dihadapan dengan permasalahan keterlibatan kepala negara dalam ideologi komunis. Pada akhirnya Orde Lama berakhir dengan digantikan oleh Orde Baru.

Orde Baru menjadi khas dan memiliki efek bagi pembentukan sebuah moralitas bangsa. Pada pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia dibawa pada sebuah kondisi yang teratur dalam arus *westernisasi* dimana negara dihadapkan pada permasalahan penciptaan kesejahteraan melalui pembangunan. Kesejahteraan yang hendak dicapai oleh Orde Baru berpusat pada pemenuhan pertumbuhan ekonomi. Artinya, sistem politik, sosial dan budaya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, negara menjadi tergantung pada modal asing. Melalui masuknya modal asing, baik dalam bentuk pinjaman dari lembaga asing maupun dalam bentuk investasi bisnis, negara tidak hanya berada dalam ketergantungan modal, tetapi di sisi lain negara berada dalam kontrol pihak asing. Kondisi inilah yang menguatkan asumsi bahwa pasar membentuk kehidupan bernegara.

Periode yang ketiga, yaitu era reformasi. Era reformasi seringkali diposisikan sebagai masa krisis dan merupakan kondisi menuju suatu era ideal. Permasalahannya,

<sup>48</sup> Penulis menggunakan konsep: NKRI, Bangsa, Negara dan Negara bangsa, secara terpisah dan diperbedakan dengan menunjukkan pada penekanan pada tiap konsepnya. NKRI merujuk pada bagaimana sebuah entitas negara terbentuk dalam ruang historis. Bangsa merujuk pada komunitas kultural yang membentuk negara. Negara merujuk pada orde atau era kepemimpinan yang membentuk suatu sistem birokrasi. Negara bangsa, merujuk pada kesatuan antara komunitas kultural yang terintegrasi dalam negara.

kondisi ideal yang dibayangkan tidak mendapatkan gambaran akan bentuk pasti darinya sehingga terkesan era ideal ini tidak ada keberadaan dan tidak tentu arahnya.

Kembali pada permasalahan yang melanda NKRI, setidaknya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, terdapat kata "Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya"<sup>49</sup>. Lalu apakah kata bangunlah ini berkaitan atau setidaknya dapat ditarik pada konsep pembangunan? Pada titik mana bangunlah ini perlu dikritisi dalam praktiknya?

"Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya", secara historis berkaitan dengan bagaimana entitas kenusantaraan ini berusaha meletakkan dirinya dalam sebuah kesatuan untuk menghadapi tantangan kolonialitas dan meraih kemerdekaan. Jiwa dan Raga yang selama era kolonial diposisikan sebagai subjek tertindas, hendak dibangkitkan dari sebuah tidur panjang, dari buaian kolonial. Dalam hal ini, Jiwa dan Raga yang terpasung dalam isu kedaerahan dan lokalitas yang sengaja dikondisikan menopang kelangsungan kolonialisme. Permasalahan ini yang kemudian dipertegas oleh Orde Lama dalam memposisikan dirinya dalam peta pertarungan ideologi global.

Konsep "Bangunlah" secara politis diambil alih bagi pembentukan konsep yang disepadankan dengan *Developmentalism*. *Developmentalism* sendiri yang diadopsi NKRI –khususnya sejak Orde Baru– merupakan pertanda bagi kemenangan ide-ide kapitalisme dan sebagai penerimaan negara pada kapitalisme. *Developmentalism* membayangkan sebuah gerak historis yang progresif dalam lintas dialektis melalui sintesa seluruh negativitas dan membentuk suatu tatanan rasional, dengan mengedepankan instrumentalisasi atas rasio.

Konsep pembangunan dengan mengkultuskan figur Soeharto sebagai bapak pembangunan memunculkan suatu pembacaan tentang bagaimana relasi perayaan kapitalisme terjadi di NKRI. Figur seorang Presiden dengan pelekatan bapak pembangunan perlu dicermati keberadaannya. Hal ini tidak saja merepresentasikan ketertundukan NKRI kepada barat, tetapi di sisi lain, negara membentuk bangun diskursus bagi penaklukan lokalitasnya atau dalam konteks ini, penaklukan terhadap nasionalitas bangsa. Presiden sebagai seorang kepala negara, melalui perangkat ideologis maupun perangkat represif<sup>50</sup>, diposisikan sebagai simbol yang harus dijaga dan "dilestarikan" kehormatannya. Kehormatan ini yang melulu diletakan dan disejajarkan dengan *kharisma*<sup>51</sup> raja, yang darinya segala permasalahan bangsa dapat dipecahkan. Presiden dianggap memiliki visi ke depan tentang negaranya, bangsa dan masyarakatnya sehingga secara sempit Presidenlah pusat negara. Pusat dari bagaimana sebuah negara dapat dilihat bentuk afiliasinya.

Kembali pada permasalahan penyepadanan konsep *Developmentalism* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai Pembangunan. Pembangunan secara simbolik tidak lagi merepresentasikan semangat "Bangunlah" dari sebuah ketertundukan –sebagaimana dalam lagu kebangsaan– melainkan menempatkan NKRI ke dalam sebuah relasi ketidaksadaran. Ketidaksadaran pada dirinya, pada negara bangsa, dan pada arah bagaimana negara bangsa akan dibawa.

<sup>49</sup> Lagu Kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman.

<sup>50</sup> Dalam konteks ini penulis merujuk pada pemikiran Althusser, tentang bagaimana sebuah Negara beroperasi melalui Ideological State Apparatus dan Represif State Apparatus. Althusser, Louis. *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards An Investigation)*. Dalam Evans, Jessica., and, Hall, Stuart. *Visual Culture The Reader*. London, Sage. 1999.

<sup>51</sup> Mills, Wright, C., Gerth, H, H (ed). *From Max Weber: Essay In Sociology*. London: Routledge, 1997.

Semangat "Bangunlah", yang hendak meletakkan NKRI sebagai negara merdeka dengan berbasis pada penyejahteraan masyarakatnya<sup>52</sup>, berubah total dengan adanya arah keberpihakan NKRI pada blok barat. Keberpihakan ini ditunjukkan dalam praktik pembangunan. Praktik pembangunan ini tidak dapat dilepaskan dari figur Presiden sebagai bapak pembangunan.

Bentuk kesadaran semangat "Bangunlah" dalam konteks ini tidak lagi berada pada kesadaran akan diri bangsa. Diri bangsa sebagai sebuah entitas riil dengan segala potensi yang dimiliki ditempatkan sebagai entitas pasif dalam menghadapi sistem kapitalisme. Artinya, konsep negara bangsa ini berada pada pusaran kapitalisme yang seakan-akan tidak memiliki ruang bagi entitas negara bangsa. Ruang yang disediakan oleh sistem kapitalisme hanya menyisakan tempat bagi sarana produksi dan pasar, sebagaimana yang terjadi pada saat ini.

Bentuk kesadaran yang dimunculkan dalam semangat "Bangunlah" menjadi dangkal, dalam pengertian dirinya tidak mewujudkan entitas NKRI sebagai yang aktif dalam membangun bangsa. Negara sebagai aparatur birokratis tidak lagi menampilkan inklusifitasnya. Inklusifitas dalam konteks ini, yaitu mampu meletakkan NKRI sebagai subjek aktif dan berkemampuan mengembangkan gagasan kebangsaan. Tetapi yang terjadi kemudian negara menjadi eksklusif, dengan meletakkan dirinya sebagai yang elit, yang memiliki akses, dan yang memiliki visi akan bangsa tanpa meletakkan masyarakat sebagai subjek.

### Praktik Pembangunan

Melalui kesadaran yang terbentuk dalam pembangunan, kemudian bagaimanakah praktik pembangunan ini digerakkan oleh negara? Pertanyaan ini muncul ketika negara bangsa ini terbentuk dalam keberpihakannya pada pembangunan yang mengedepankan semangat kapitalistik. Sebagaimana dibahas dalam diskursus pembangunan di atas, NKRI berada dalam sistem kapitalistik yang mengedepankan rasio dalam menginstrumentalisasikan dunia. Artinya, dalam konteks ini NKRI dimulai dari kebijakan-kebijakan Orde Baru mengembangkan seperangkat rasionalitas instrumental yang elitis.

*Pembangunan dan moralitas dalam konteks ini tidak lagi menjadi hal yang berbeda dalam pengertian adanya sandaran moral yang mampu berbicara pada nilai kebangsaan. Sandaran moral yang dibayangkan ada dan ditempatkan secara sakral telah berada dalam instrumentalisasi dirinya. Elit negaralah yang mengkondisikan hal ini dengan penyatuan bangsa pada sistem kapitalisme.*

Kemudian, mengapa permasalahan ini diletakan pada elit negara? Bagaimana hal tersebut membangun realasi pada sandaran moral? Elit negara tidak dapat dipungkiri mengembangkan perangkat birokratis yang darinya negara memiliki kekuatan legal formal dalam melakukan kekerasan pada subjek yang diatur oleh negara<sup>53</sup>. Artinya, negara dalam hal ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan dan mengarahkan negara bangsa. Arah negara berada dalam arah yang telah dibangun oleh sistem kapitalisme sehingga konsep pembangunan merupakan suatu konsep yang secara sadar dan rasional menempatkan NKRI di dalam sistem kapitalisme yang berpusat pada barat. Relasi barat dengan NKRI terwujud dalam konsep pembangunan dimana NKRI diposisikan sebagai subjek pra-oedipal<sup>54</sup>. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah adanya ketidaksadaran akan

<sup>52</sup> Dalam konteks ini, yang dimaksudkan adalah tujuan Negara yang tertunag dalam pembukaan UUD 1945.

<sup>53</sup> Mills, Wright, C., Gerth, H, H (ed) .*Ibid.*

<sup>54</sup> Freud, Sigmund. *Pengantar Psi koanalisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

dirinya sehingga harus ditarik pada tatanan oedipal sebagai sistem kebenaran yang harus dianut. Sistem oedipal ini tidak lain merupakan perwujudan dari sistem kapitalisme yang merepresentasikan seluruh kebenaran pada apa yang terjadi di Barat. Barat mengembangkan dirinya sebagai sosok yang memiliki kebenaran dengan perangkat penunjang untuk kebenaran itu, dimulai dengan penciptaan arah pembangunan, penyediaan sarana pembangunan –modal, mesin produksi, sistem demokrasi- dan lain-lain.

Sementara itu, bapak pembangunan diletakkan sebagai subjek yang telah sadar dan mengerti akan arah negara bangsa, mengerti bagaimana negara bangsa ini harus berkembang. Kondisi sadar dari bapak pembangunan ini yang kemudian ditopang oleh bangunan aparatur birokrasi. Kemudian bagaimanakah relasinya pada sandaran moral?

Moral dalam konteks ini dikaitkan sebagai nilai sakral yang menjadi sumber bagaimanakah sebuah negara bangsa mewujudkan dirinya. Permasalahan moral menjadi kompleks ketika diletakan pada bagaimana sebuah Negara berada pada sistem kapitalisme. Pada konteks ini, dilihat sebagai sistem yang riil dan bergerak dalam mengembangkan sebaran atau jangkauan praktik kapitalismenya.

Moral merupakan *Mode of Orality* yang tidak hanya direduksi menjadi yang transedental di atas kehidupan berbangsa melainkan dirinya berada di dalam dan melekat pada kehidupan berbangsa. Yang darinya, suatu bangsa mengembangkan cara bertutur dan mencari kebenaran dalam praktik kehidupannya. Moral dalam hal ini merupakan bagian dari bagaimanakah sebuah bangsa mengembangkan sebuah etika.

Ketika negara bangsa berada dalam suatu sistem yang kapitalistik, moral dan etika akan merepresentasikan kondisi sistem kapitalisme tersebut. Dalam hal ini, instrumentalitas rasio menjadi jamak dilakukan dan negara memiliki legalitas dalam melakukan praktik ini. Sebuah praktik dalam melakukan kekerasan terhadap bangsanya yang termanifestasi dalam tindak penggusuran, penghilangan paksa, dan lain-lain.

### Sketsa Mode of Orality

Gerak negara dalam menciptakan kehidupan bagi negara bangsa tidaklah berada dalam titik diam yang statis dan anti perubahan melainkan berada dalam gerak progresif dalam menciptakan suatu tatanan Ideal bagi negara bangsanya. Seringkali negara bangsa dijebak oleh sistem yang secara *instant* digambarkan mampu melepaskan permasalahan bangsa dan menempatkan bangsa pada kondisi tinggal landas. Pada akhirnya, negara terbuai dalam pusaran kapitalisme dan terseret dalam arus hutang sehingga terlihat tidak ada jalan keluar darinya.

Hal tersebut ditampakkan dengan penggunaan konsep pembangunan dengan segala *instrument* penopangnya, yaitu dengan segala cara bagaimana elit sebuah negara memposisikan dirinya dan negara bangsanya. Permasalahannya kemudian bagaimanakah sebuah negara bangsa mampu melepaskan diri dari hal ini? Dalam menjawab permasalahan ini setidaknya memerlukan suatu sketsa dalam pembentukan moralitas, yaitu dalam pembentukan *Mode of Orality*.

Pembangunan sebagai sebuah konsep baku hendaknya dipikirkan dalam merujuk pada permasalahan bangsa ini. Dengan demikian, rujukannya adalah bagaimana mengedepankan perkembangan yang berpusat ada subjek-subjek bangsa yang dalam praktik kesehariannya berkehendak dalam mengembangkan dirinya dan bangsanya. Jebakan instrumentalitas rasio yang eropa sentris tidak hanya menampilkan diri sebagai yang natural. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan akar historis negara bangsa. Akar historis negara bangsa ini yang perlu digali ulang dengan bersandar pada entitas bangsa.

*Mode of Orality* hendaknya mampu menjadi formasi diskursus dalam meletakkan kesadaran subjek-subjek bangsa dan menempatkan kesadaran akan dirinya.

*Mode of Orality*, sebagai sebuah cara bertutur yang bersandar pada nilai lokal, dengan menggagas pada kondisi material saat ini, tentunya akan mendapatkan bentuk yang penuh instrumentalitas. Untuk menghindari ini, perlu sekiranya membangkitkan suatu semangat pengedepanan pada yang sosial. Lalu Apa yang dimaksudkan dengan yang sosial ini? Bagaimanakah kemudian yang sosial ini mampu meletakkan sebuah praktik etika?

Yang dimaksudkan dengan yang sosial, merujuk pada bagaimana individu ditempatkan, di dalam sebuah formasi pengetahuan, di dalam sebuah kondisi sosio kultural. Individu, sebagai sebuah entitas yang berada didalam masyarakat, atau dalam ruang yang lebih luas, didalam negara bangsa, tidaklah dapat dipisah-pisahkan, dan sepenuhnya otonom. Selalu ada yang sosial di dalam dirinya.

Individu dan dirinya yang meriyatu dengan dunia sosial ini, ditampakkan dengan kebertubuhannya, dimana seluruh yang dipraktikan oleh tubuh tak dapat dilepaskan pada yang di luar tubuh. Pembentukan tubuh dengan pengetahuan yang melekat padanya. Meskipun dalam formasi pengetahuan saat ini –khususnya sejak era modern– yang terbawa arus globalisasi, dengan bentuk individualitas yang anti sosial menjadi tontonan dalam keseharian, dan dipertajam birokrasi menjadi lembaga formal yang mengontrol praktik etika<sup>55</sup>, yang seakan selalu menghadirkan kontradiksi dalam *Mode of Orality*.

Melalui bentuk formasi yang terformalkan dalam instrumentalitas rasio individual, berujung pada bentuk praktik etika sebagaimana terjadi saat ini. Merupakan ruang bagi pembentukan *Mode of Orality*, dengan kebertubuhan pada yang sosial. Dengan kembali pada yang sosial dan menempatkan yang sosial sebagai yang riil dan tak terpisahkan dari individu. Pondasi inilah yang mampu diketemukan dalam konsep “bangunlah” sebagaimana dipraktikan pada awal terbentuknya negara bangsa. Yang menempatkan negara tidak hanya sebagai aparat birokratis, melainkan sebagai bagian dari yang sosial. *Developmentalisme* yang diwujudkan, bukanlah yang berbasis pada ekonomi dengan berpihak pada pihak asing, melainkan pada yang sosial, yang riil dalam negara bangsa Indonesia.

Kembali pada dasar “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya”, merupakan tawaran dari permasalahan yang terjadi saat ini. Pembentukan ulang dari “Bangunlah” dalam setting-setting yang sosial. Juga pembentukan subjek-subjek yang terintegrasi dalam yang sosial, sebagai basis dari “Bangunlah”.

<sup>55</sup> Foucault, Michel. *Ethics: Subjectivity and Truth*. New York: The New Press, 1994.